

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022



Jl. Babakan Karet. Kelurahan Derwati. Kecamatan Rancasari

TAHUN  
2023



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2020 dapat diselesaikan penyusunannya dengan lancar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2022 melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yang melekat pada SKPD, yaitu urusan sosial dan non urusan. Pelaksanaan pada urusan sosial terdiri dari 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan, dengan anggaran Rp 18.361.008.325 dan terealisasi Rp 17.448.003.022 serta sisa Rp 913.005.303 atau tercapai 95,03%. Pelaksanaan pada non urusan terdiri atas 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan, dengan anggaran yaitu Rp 29.450.789.188 dan terealisasi Rp 28.222.199.140 serta sisa Rp 1.228.590.048 atau tercapai 95,83%. Target capaian kinerja sasaran 1 (satu) dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) mencapai 131,11% dan sasaran 2 (dua) dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 102,38%.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga dapat memberikan manfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 4 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

**B. Gambaran Umum Dinas Sosial**

Dinas Sosial Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang sebelumnya berbentuk Dinas Sosial Kota Bandung sebagai Lembaga Teknis Daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Bandung sebagaimana diatur melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 1.

Dinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Pada Tahun 2021 terjadi penyederhanaan dan penyetaraan birokrasi sebagai amanat dari Peraturan Menpan & RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, yang berdampak pada perubahan komposisi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandung. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung saat ini sebanyak 74 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Struktur dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung**  
**berdasarkan Jabatan Struktural**

| NO | SKPD         | Eselon |     |    | Fungsional | Pelaksana |     |    |   | Jumlah |
|----|--------------|--------|-----|----|------------|-----------|-----|----|---|--------|
|    |              | II     | III | IV |            | IV        | III | II | I |        |
| 1. | Dinas Sosial | 1      | 5   | 2  | 48         | -         | 17  | 1  | - | 74     |



### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan urusan sosial.

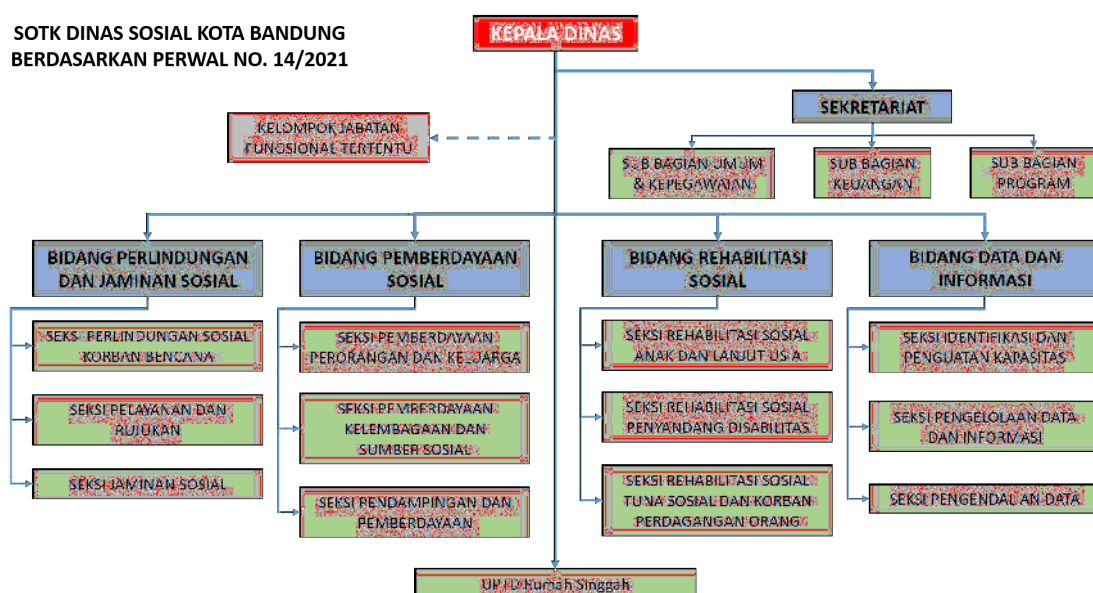
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial;
- pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh H. Soni Bakhtiyar, S.Sos., M.Si. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi ini:

**Gambar 1.1**

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung**



#### **D. Isu Strategis**

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 diketemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial Bandung Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah masyarakat miskin di Kota Bandung.
2. Adanya *inclusion* dan *exclusion error* pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
3. Permasalahan PPKS Terlantar dan berada di jalan di Kota Bandung.



4. Integrasi dan optimalisasi penanganan PPKS antara Pemerintah, dan masyarakat khususnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

#### **E. Landasan Hukum**

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

#### **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 4 adalah :

##### **BAB I     PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

##### **BAB II    PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### BAB IV PENUTUP





## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 4 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor TU.01.02/2343-Dinsos/XII/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kota Bandung dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis.

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing
- b. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih

## **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan



untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Tahun 2019-2023 sebanyak 2(dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Sosial Kota Bandung**

| NO  | TUJUAN                                            | SASARAN                                                              | INDIKATOR KINERJA                 | TARGET KINERJA PADA TAHUN |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                   |                                                                      |                                   | 2019                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2)                                               | (3)                                                                  | (4)                               | (5)                       | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |
| 1   | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) |                           |      | 80   | 0.45 | 0.5  |
| 2   | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung            | Nilai IKM                         |                           |      | 85   | 85   | 85   |

**B. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : TU.01.02/0063-Dinsos/I/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Bandung tahun 4 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                    | INDIKATOR KINERJA                 | SATUAN | PENJELASAN                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      |                                   |        | ALASAN                                                                | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN                                                                                                                           | SUMBER DATA                                                                                                            |
| 1  | Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) | Nilai  | Amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial | Nilai akumulasi indeks atas pemenuhan kebutuhan dasar, pelaksanaan peran sosial, serta kemandirian ekonomi penduduk miskin dan rentan di Kota Bandung. | PPKS yang memperoleh bantuan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung            | Nilai IKM                         | Nilai  | Guna mendukung Nilai kualitas pelayanan pemerintah kota               | Mengacu pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang SKM                                                                                                | Mengacu pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang SKM                                                                |

**C. Perjanjian Kinerja Tahun 4**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 4 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 4, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 4, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 4, Dinas Sosial Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 4 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung**  
**Tahun 2022**

| No | Sasaran Strategis                                                    | Indikator Kinerja                 | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) | 0.45   |
| 3  | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung            | Nilai IKM                         | 85     |

## 1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 4, sebagai berikut :

### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Sosial terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 4

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :



Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 4 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Sosial Kota Bandung**

| NO | TUJUAN                                            | SASARAN                                                              | INDIKATOR KINERJA                 | SATUAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1  | Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) | Nilai  |      |      | 80   | 0.45 | 0.5  |
|    |                                                   | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung            | Nilai IKM                         | Nilai  |      |      | 85   | 85   | 85   |

**B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA           | SATUAN | ALASAN                                                                | FORMULASI/CARA PENGUKURAN                                                                                                                              | SUMBER DATA | KETERANGAN/KRITERIA                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) | Nilai  | Amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial | Nilai akumulasi indeks atas pemenuhan kebutuhan dasar, pelaksanaan peran sosial, serta kemandirian ekonomi penduduk miskin dan rentan di Kota Bandung. |             | PPKS yang memperoleh bantuan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung            | Nilai IKM                         | Nilai  | Guna mendukung Nilai kualitas pelayanan pemerintah kota               | Mengacu pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang SKM                                                                                                |             | Mengacu pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang SKM                                                                |



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Sosial dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 4 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                    | IKU / INDIKATOR KINERJA           | SATUAN | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) | Nilai  | 0.45   |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung            | Nilai IKM                         | Nilai  | 85     |



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis



dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

| Persentase | Predikat                | Kode Warna |
|------------|-------------------------|------------|
| < 100%     | Tidak Tercapai          |            |
| = 100%     | Tercapai/ Sesuai Target |            |
| > 100%     | Melebihi Target         |            |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Bandung  
Tahun 2022**

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
|----|-----------------------|---------------------|------------|
| 1  | Sangat Baik           | > 90                |            |
| 2  | Baik                  | 75.00 – 89.99       |            |
| 3  | Cukup                 | 65.00 – 74.99       |            |
| 4  | Kurang                | 50.00 – 64.99       |            |
| 5  | Sangat Kurang         | 0 – 49.99           |            |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target



sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: TU.01.02/0063-Dinsos/I/2022 telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor TU.01.02/0063-Dinsos/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: ..... tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kota Bandung juga melakukan revidi terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan revidi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Sosial Kota Bandung**  
**Tahun 2022**

| No | Indikator Kinerja Utama           | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|-----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1  | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) | Nilai  | 0.45   | 0.59      | 131.11    |
| 2  | Nilai IKM                         | Nilai  | 85     | 87.02     | 102.38    |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS), dengan capaian kinerja 131.11 %, pada indikator Nilai IKM, dengan capaian kinerja 102.38 %.

**C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Dinas Sosial Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022**

| No | Indikator Kinerja                 | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|-----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1  | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) | Nilai  | 0.45   | 0.59      | 131.11    |
| 4  | Nilai IKM                         | Nilai  | 85     | 87.02     | 102.38    |



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut:

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS         | CAPAIAN  |
|----|---------------------------|----------|
| 1  | Melebihi/Melampaui Target | 100.00 % |
| 2  | Sesuai Target             | 0.00 %   |
| 3  | Tidak Mencapai Target     | 0.00 %   |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

| No | Misi          | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian |               |               |             |                       |             |
|----|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
|    |               |                          | Melampaui target   |               | Sesuai Target |             | Belum Mencapai Target |             |
|    |               |                          | Jumlah             | %             | Jumlah        | %           | Jumlah                | %           |
| 1  | Misi 1        | 2                        | 2                  | 100.00        | 0             | 0.00        | 0                     | 0.00        |
| 2  | Misi 2        | 1                        | 1                  | 100.00        | 0             | 0.00        | 0                     | 0.00        |
| 3  | Misi 3        | 1                        | 1                  | 100.00        | 0             | 0.00        | 0                     | 0.00        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>4</b>                 | <b>4</b>           | <b>100.00</b> | <b>0</b>      | <b>0.00</b> | <b>0</b>              | <b>0.00</b> |

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

| No        | Kategori                  | Jumlah Indikator | Persentase |
|-----------|---------------------------|------------------|------------|
| <b>A.</b> | <b>Misi 1</b>             | <b>2</b>         |            |
| 1         | Melebihi/Melampaui Target | 2                | 100.00 %   |
| 2         | Sesuai Target             | 0                | 0.00 %     |
| 3         | Tidak Mencapai Target     | 0                | 0.00 %     |
|           |                           |                  |            |
| <b>B.</b> | <b>Misi 2</b>             | <b>1</b>         |            |
| 1         | Melebihi/Melampaui Target | 1                | 100.00 %   |
| 2         | Sesuai Target             | 0                | 0.00 %     |
| 3         | Tidak Mencapai Target     | 0                | 0.00 %     |
|           |                           |                  |            |
| <b>C.</b> | <b>Misi 3</b>             | <b>1</b>         |            |
| 1         | Melebihi/Melampaui Target | 1                | 100.00 %   |
| 2         | Sesuai Target             | 0                | 0.00 %     |
| 3         | Tidak Mencapai Target     | 0                | 0.00 %     |
|           |                           |                  |            |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.



- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:



| Sasaran 1                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan |

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya**  
**Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan**

| No | Indikator Kinerja                 | Satuan | Tahun 2019 |           | %    | Tahun 2020 |           | %    | Tahun 2021 |           | %    | Tahun 2022 |           | %      |
|----|-----------------------------------|--------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|--------|
|    |                                   |        | Target     | Realisasi |      | Target     | Realisasi |      | Target     | Realisasi |      | Target     | Realisasi |        |
| 1  | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) | Nilai  |            |           | 0.00 |            |           | 0.00 |            |           | 0.00 | 0.45       | 0.59      | 131.11 |

Sasaran Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)" adalah sebesar 0.59 dari target sebesar 0.45 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 131.11 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)" tahun ini meningkat 131.11 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Kinerja Nyata Dengan Target Akhir Renstra**  
**Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu**

| No | Indikator Kinerja                 | Satuan | Realisasi dan Target         |                                  | %      |
|----|-----------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------|--------|
|    |                                   |        | Target Capaian Akhir Renstra | Realisasi Capaian Tahun Berjalan |        |
| 1  | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) | Nilai  | 0.45                         | 0.59                             | 131.11 |





Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)" tahun ini adalah sebesar 131.11 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sosial maka capaian kinerjanya mencapai 118.00 %.

### **Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator**

Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan dirumuskan berdasarkan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana objek sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah warga miskin dan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Bandung. Adapun jenis dan penjelasan tentang PPKS dapat dilihat pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS.

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan ialah Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) yang merupakan nilai akumulasi atas variabel-variabel pembentuknya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

### **Instrumen atau Cara Pengukuran Indikator**

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan ialah Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) yang merupakan nilai akumulasi atas variabel-variabel pembentuknya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Guna mengukur Indeks Kesejahteraan Sosial dilakukan pembobotan atas masing-masing variabel tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian kinerja penyelenggaran rehabilitasi sosial memiliki bobot 30%, Untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan rehabilitasi sosial berdasarkan persentase layanan yang diberikan kepada para PPKS yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial;
2. Capaian kinerja penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial memiliki bobot 30%, untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan



pemberdayaan sosial berdasarkan persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

3. Capaian kinerja penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial memiliki bobot 40%, untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan persentase warga miskin dan PPKS yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial.

**Kinerja Nyata dengan Rencana**

Pada Tahun 2022 Dinas Sosial menargetkan pencapaian Indeks Kesejahteraan Sosial pada angka 0,45, adapun realisasi atas target sasaran tersebut pada akhir Tahun 2022 yakni sebesar 0,59. Pencapaian realisasi kinerja tersebut diperoleh berdasarkan capaian kinerja variabel-variabel pembentuknya yaitu layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial. Adapun rincian pengukuran atas capaian kinerja indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran**

| No | Jenis Layanan                   | Indikator Kinerja                                                                                           | Target<br>(org/KK) | Realisasi<br>(org/KK) | Capaian<br>Kinerja | Bobot<br>Indeks | Nilai<br>Indeks |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Rehabilitasi Sosial             | Persentase PPKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar                                           | 4,959              | 4,496                 | 90.66              | 30%             | 0,27            |
| 2  | Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase PPKS dan warga miskin yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial                    | 319,578            | 110,695               | 34.64              | 40%             | 0,14            |
| 3  | Pemberdayaan Sosial             | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 1,514              | 952                   | 62.88              | 30%             | 0,18            |
|    | JUMLAH                          |                                                                                                             |                    |                       |                    |                 | 0,59            |



**Kinerja Nyata dengan Target Triwulan sebelumnya**

Realisasi kinerja pada Triwulan IV tidak dapat dibandingkan dengan realisasi atas pencapaian kinerja pada trwulan sebelumnya, mengingat pada Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran atas Indeks Kesejahteraan Sosial.

**Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan**

Para Triwulan IV Tahun 2022 kami menargetkan pencapaian Indeks Kesejahteraan Sosial pada angka 0,45, adapun realisasi atas target sasaran tersebut pada Triwulan II Tahun 2022 yakni sebesar 0,59. Capaian kinerja tersebut berbanding lurus dengan target capaian kinerja tahunan, dimana target kinerja Tahun 2022 untuk Indeks Kesejahteraan Sosial yaitu 0,45 terealisasi sebesar 0,59

**Tabel 3.9**

**Tabel Capaian Kinerja Tahunan**

| No | Sasaran                                                              | Inidkator Kinerja           | Target | Realisasi | Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan | Indeks Kesejahteraan Sosial | 0,45   | 0,59      | 131%    |

**Perbandingan Kinerja Dengan Kinerja Instansi Lainnya**

Capaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun ini dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial belum dapat dibanding dengan instansi lain mengingat indikator kinerja tersebut baru dipergunakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

**Perbandingan Kinerja Nyata dengan Standar Nasional**

Capaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun ini dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial belum dapat dibanding dengan standar nasional mengingat indikator kinerja tersebut baru dipergunakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.



Output Program/Kegiatan Dan Keuangan

Untuk mendukung pencapaian Indeks Kesejahteraan Sosial tentunya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan beserta alokasi anggarannya sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 1

| No | Urusan/Bidang/<br>Program/Kegiatan                                                                                                     | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | %     | Outcome / Output                                                                                                                               | Target<br>Outcome<br>/ Output | Realisasi<br>Outcome<br>/ Output |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                      | 3              | 4              | 5     | 6                                                                                                                                              | 7                             | 8                                |
|    | Urusan Wajib Pelayanan Dasar                                                                                                           |                |                |       |                                                                                                                                                |                               |                                  |
|    | Sosial                                                                                                                                 |                |                |       |                                                                                                                                                |                               |                                  |
|    | Dinas Sosial                                                                                                                           | 18.361.008.325 | 17.448.003.022 | 95,03 |                                                                                                                                                |                               |                                  |
| A  | Program<br>Pemberdayaan<br>Sosial                                                                                                      | 1.625.825.730  | 1.175.059.100  | 72,27 | Cakupan Potensi Sumber<br>Kesejahteraan Sosial<br>(PSKS) yang berpartisipasi<br>aktif dalam<br>penyelenggaraan<br>kesejahteraan sosial         | 80%                           | 62,50%                           |
| I  | Kegiatan<br>Pengumpulan<br>Sumbangan dalam<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                 | 65.928.800     | 65.103.800     | 98,75 | Jumlah laporan<br>pengumpulan sumbangan<br>uang dan barang                                                                                     | 4<br>laporan                  | 4<br>laporan                     |
| 1  | Sub Kegiatan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penerbitan Izin<br>Undian Gratis<br>Berhadiah dan<br>Pengumpulan Uang<br>atau Barang | 65.928.800     | 65.103.800     | 98,75 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penerbitan Izin Undian<br>Gratis Berhadiah dan<br>Pengumpulan Uang atau<br>Barang       | 4<br>dokumen                  | 4<br>dokumen                     |
| II | Kegiatan<br>Pengembangan<br>Potensi Sumber<br>Kesejahteraan<br>Sosial Daerah<br>Kabupaten/Kota                                         | 1.559.896.930  | 1.109.955.300  | 71,16 | Jumlah kegiatan<br>pengembangan PSKS                                                                                                           | 6<br>kegiatan                 | 6<br>kegiatan                    |
| 1  | Peningkatan<br>Kemampuan<br>Potensi Pekerja<br>Sosial Masyarakat<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                       | 68.887.500     | 66.667.500     | 96,78 | Jumlah Orang Mendapat<br>Peningkatan Kapasitas<br>Pekerja Sosial Masyarakat<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                    | 2<br>kegiatan                 | 2<br>kegiatan                    |
| 2  | Peningkatan<br>Kemampuan<br>Potensi Tenaga<br>Kesejahteraan<br>Sosial Kecamatan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                        | 72.737.500     | 68.977.500     | 94,83 | Jumlah Tenaga<br>Kesejahteraan Sosial<br>Kecamatan Kewenangan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Meningkat Kapasitasnya<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 30 orang                      | 30 orang                         |
| 3  | Peningkatan<br>Kemampuan<br>Potensi Sumber<br>Kesejahteraan<br>Sosial Kelembagaan<br>Masyarakat<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota        | 1.418.271.930  | 974.310.300    | 68,70 | Jumlah Lembaga<br>Kesejahteraan Sosial yang<br>Meningkat Kapasitasnya<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                          | 4<br>kegiatan                 | 4<br>kegiatan                    |
| B  | Program<br>Rehabilitasi Sosial                                                                                                         | 5.044.798.935  | 4.802.958.643  | 95,21 | Cakupan PPKS terlantar<br>yang memperoleh layanan<br>rehabilitasi sosial dasar<br>sesuai Standar Pelayanan<br>Minimal (SPM) Bidang<br>Sosial   | 80%                           | 100%                             |



|   |                                                                                                                                                                            |                |               |       |                                                                                                                |             |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| I | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial                | 5.044.798.935  | 4.802.958.643 | 95,21 | Persentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layananrehabilitasi sosial dasar | 100%        | 100%        |
| 1 | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan                                                                                                                                            | 1.714.931.375  | 1.679.122.093 | 97,91 | Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan permakanan               | 100%        | 100%        |
| 2 | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang                                                                                                                                            | 679.641.470    | 666.385.725   | 98,05 | Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansiater lantar yang memperoleh layanan bantuan sandang          | 100%        | 100%        |
| 3 | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | 163.844.670    | 160.170.450   | 97,76 | Persentase disabilitas yang memperoleh alat bantu gerak                                                        | 100%        | 100%        |
| 4 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | 1.323.895.900  | 1.251.795.415 | 94,55 | Jumlah PMKS terlantar yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                            | 100%        | 100%        |
| 5 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 100.000.000    | 65.220.000    | 65,22 | Jumlah Keluarga PMKS Terlantar yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                   | 40 keluarga | 35 keluarga |
| 6 | Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | -              | -             |       | Persentase peserta PKH yang mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan                                   | 0%          | 0%          |
| 7 | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                          | 274.024.000    | 264.972.500   | 96,70 | Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                           | 100%        | 100%        |
| 8 | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | 591.026.010    | 527.808.450   | 89,30 | Persentase PMKS terlantar yang memperoleh layanan kedaruratan                                                  | 100%        | 100%        |
| 9 | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     | 197.435.510    | 187.484.010   | 94,96 | Prosentase klien rumah singgah dan PMKS lainnyayang memperoleh layanan rujukan                                 | 100%        | 100%        |
| C | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                                                                                    | 10.130.076.500 | 9.944.892.500 | 98,17 | Persentase DTKS terpilah yang dimanfaatkan dalam penanganan kemiskinan                                         | 100%        | 100%        |
|   |                                                                                                                                                                            |                |               |       | Cakupan Warga miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial                                           | 76,82%      | 99,00%      |
|   |                                                                                                                                                                            |                |               |       | Cakupan anak terlantar dalam panti yang memperoleh layanan asuh sesuai NSPK                                    | 100%        | 100%        |
| I | Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                                                  | 15.000.000     | 9.008.000     | 60,05 | Jumlah dokumen pelaporan pemantauan pemeliharaan anak terlantar                                                | 100%        | 100%        |



|    |                                                                                                |                |               |       |                                                                                                |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar                       | 15.000.000     | 9.008.000     | 60,05 | Jumlah laporan hasil pemantauan pemeliharaan anak terlantar                                    | 4 dokumen   | 4 dokumen   |
| II | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                           | 10.115.076.500 | 9.935.884.500 | 98,23 | Cakupan data fakir miskin yang valid dan mutakhir                                              | 100%        | 100%        |
|    |                                                                                                |                |               |       | Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi | 75 keluarga | 75 keluarga |
| 1  | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                              | 720.672.800    | 716.305.000   | 99,39 | Jumlah laporan hasil pemutakhiran data fakir miskin                                            | 4 dokumen   | 4 dokumen   |
| 2  | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                       | 292.780.360    | 287.800.500   | 98,30 | Presentase SKPD yang seharusnya memanfaatkandata terpadu kemiskinan atau DTKS                  | 100%        | 100%        |
| 3  | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                               | 8.825.633.340  | 8.672.559.000 | 98,27 | Cakupan keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial                                         | 60%         | 99%         |
| 4  | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                | 275.990.000    | 259.220.000   | 93,92 | Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi | 75 keluarga | 75 keluarga |
| D  | Program Penanganan Bencana                                                                     | 1.560.307.160  | 1.525.092.779 | 97,74 | Persentase capaian SPM kebencanaan Bidang Sosial                                               | 100%        | 100%        |
| I  | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | 599.902.160    | 581.642.279   | 96,96 | Cakupan korban bencana yang memperoleh bantuan tanggap darurat                                 | 100%        | 100%        |
| 1  | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan                                                                | 548.246.160    | 532.874.879   | 97,20 | Cakupan penyediaan bantuan pangan bagi korban bencana                                          | 100%        | 100%        |
| 2  | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang                                                                | 51.656.000     | 48.767.400    | 94,41 | Cakupan penyediaan bantuan logistik sandang bencana                                            | 100%        | 100%        |
| II | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 960.405.000    | 943.450.500   | 98,23 | Jumlah kegiatan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana                                             | 2 kegiatan  | 2 kegiatan  |
| 1  | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                     | 78.405.000     | 69.055.000    | 88,07 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kampungsiaga bencana                               | 2 kegiatan  | 2 kegiatan  |
| 2  | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                      | 882.000.000    | 874.395.500   | 99,14 | Jumlah personil Tagana yang Sosial Korban mengikuti pelatihan tanggap bencana                  | 60 orang    | 60 orang    |

Apabila kita membandingkan antara Capaian Kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada sasaran ke-1 maka kita



dapat melihat tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja pasa Sasaran 1 yaitu sebesar 36,08% sementara tingkat efektivitasnya sebesar 137,96%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran atas Capaian Kinerja Sasaran 1**

| No                          | Sasaran                                                              | Indikator                          |                             | Satuan | Kinerja |           |        | Keuangan          |                                         |                |               |       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|-------|
|                             |                                                                      |                                    |                             |        | Target  | Realisasi | (%)    |                   | Program                                 | Pagu           | Realisasi     | %     |
| 1                           | Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan | 1                                  | Indeks Kesejahteraan Sosial | Nilai  | 0.45    | 0.59      | 131.11 | 1                 | Program Pemberdayaan Sosial             | 1.625.825.730  | 1.175.059.100 | 72,27 |
|                             |                                                                      |                                    |                             |        |         |           |        | 2                 | Program Rehabilitasi Sosial             | 5.044.798.935  | 4.802.958.643 | 95,21 |
|                             |                                                                      |                                    |                             |        |         |           |        | 3                 | Program Perlindungan dan jaminan sosial | 10.130.076.500 | 9.944.892.500 | 98,17 |
|                             |                                                                      |                                    |                             |        |         |           |        | 4                 | Program Penanganan Bencana              | 1.560.307.160  | 1.525.092.779 | 97,74 |
|                             |                                                                      | RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR |                             |        |         |           | 131.11 | TOTAL PER SASARAN | 18.361.008.325                          | 17.448.003.022 | 95,03         |       |
| TINGKAT EFISIENSI 36,08 %   |                                                                      |                                    |                             |        |         |           |        |                   |                                         |                |               |       |
| TINGKAT EFEKTIFITAS 137,96% |                                                                      |                                    |                             |        |         |           |        |                   |                                         |                |               |       |

**Faktor Pendukung**

Pemberian layanan kepada warga miskin dan PPKS di Kota Bandung tentunya tidak terbatas hanya bersumber dari APBD Kota Bandung mengingat jumlah warga miskin dan PPKS di Kota Bandung yang relatif tinggi, oleh karena itu kami terus menjalin hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, para perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang ikut menanggulangi permasalahan kemiskinan serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya yang ada di Kota Bandung.

**Faktor Penghambat**

Salah satu faktor yang dapat menghambat ketercapaian target IKS ialah masih sering terjadinya keterlambatan realisasi program bantuan sosial yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. seperti BPNT dan PKH.

**Solusi**

Salah satu solusi yang dikembangkan guna meminimalisir kendala tersebut ialah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin dan intensif dengan pihak perbankan dan PT. Pos selaku pihak penyalur bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial.



| Sasaran 2                                                 |
|-----------------------------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung |

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.12**  
**Analisis Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung**

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 |           | %    | Tahun 2020 |           | %    | Tahun 2021 |           | %      | Tahun 2022 |           | %      |
|----|-------------------|--------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
|    |                   |        | Target     | Realisasi |      | Target     | Realisasi |      | Target     | Realisasi |        | Target     | Realisasi |        |
| 1  | Nilai IKM         | Nilai  |            |           | 0.00 |            |           | 0.00 | 85         | 86.54     | 101.81 | 85         | 87.02     | 102.38 |

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai IKM" tahun ini meningkat 0.57 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.81

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai IKM" adalah sebesar 87.02 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.38 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

**Tabel 3.13**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Kinerja Nyata dengan Target Akhir Renstra**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung**

| No | Indikator Kinerja                | Satuan | Realisasi dan Target         |                                  | %      |
|----|----------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------|--------|
|    |                                  |        | Target Capaian Akhir Renstra | Realisasi Capaian Tahun Berjalan |        |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai  | 85                           | 87.02                            | 102.38 |

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai IKM" tahun ini adalah sebesar 102.38 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sosial maka capaian kinerjanya mencapai 102.38%.

**Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator**

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik saat ini Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan reformasi



Birokrasi mewajibkan setiap instansi pemerintah terutama yang melayani kepentingan publik untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang menjadi sasaran layanannya. Sebagaimana amanat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat dipergunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik. Target Indeks Kepuasan Masyarakat yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial sebesar 85.

Berdasarkan Keputusan Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017 tersebut dimana unsur penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat mencakup 9 unsur, yang meliputi:

1. **Persyaratan Pelayanan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur pelayanan**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
4. **Biaya pelayanan**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. **Kompetensi Pelaksana**, Yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana Pelayanan**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan Prasarana Pelayanan**, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama



terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Beberapa pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat antara lain:

- 1. Pemberian rekomendasi keringanan biaya pengobatan bagi warga miskin
- 2. Pemberian rekomendasi keringanan biaya pendidikan di perguruan tinggi bagi warga yang kurang mampu
- 3. Pemberian rekomendasi bagi warga yang mengajukan permohonan proses adopsi anak
- 4. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Sosial
- 5. Penerbitan ijin penyelenggaraan pengumpulan uang/barang (sumbangan sosial)
- 6. Pemberian uang transport bagi orang yang terlantar dalam perjalanan dan ingin kembali ke daerah asal

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah penerima layanan yang diperoleh pada 2022 adalah sebanyak 3.826 Orang, sehingga menurut Tabel Morgan dan Krejcie maka sampel yang digunakan sebanyak 350 orang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.14**  
**Jumlah Responden Tahun 2022**

| NO | KARAKTERISTIK | INDIKATOR     | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|---------------|---------------|--------|------------|
| 1  | Jenis Kelamin | Laki-Laki     | 122    | 35%        |
|    |               | Perempuan     | 228    | 65%        |
| 2  | Pendidikan    | SD Kebawah    | 57     | 16%        |
|    |               | SMP           | 100    | 29%        |
|    |               | SMA           | 174    | 50%        |
|    |               | DI/DII/DIII   | 6      | 2%         |
|    |               | S1            | 13     | 4%         |
|    |               | S2            | 0      | 0%         |
| 3  | Pekerjaan     | PNS/TNI/POLRI | 0      | 0%         |
|    |               | Swasta        | 0      | 0%         |
|    |               | Wirausaha     | 0      | 0%         |



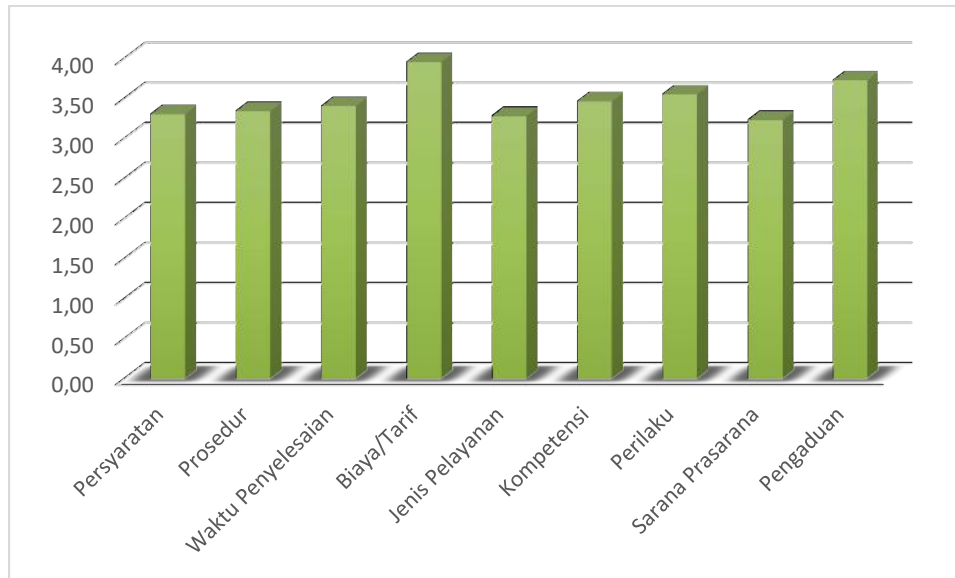
|   |               |                                                            |     |     |
|---|---------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|
|   |               | Pelajar/Mahasiswa                                          | 27  | 8%  |
|   |               | Lainnya                                                    | 323 | 92% |
| 4 | Jenis Layanan | Bantuan Sosial PKH BPNT                                    | 15  | 4%  |
|   |               | Surat Keterangan DTKS/ SKTM/ Sertifikat/ Surat Rekomendasi | 267 | 76% |
|   |               | Kartu Indonesia Pintar (KIP) Beasiswa                      | 8   | 2%  |
|   |               | Baznas                                                     | 2   | 1%  |
|   |               | BPJS/PBI                                                   | 31  | 9%  |
|   |               | Pelayanan Rumah Singgah                                    | 0   | 0%  |
|   |               | Bimbingan Sosial                                           | 0   | 0%  |
|   |               | Layanan Anak Terlantar                                     | 2   | 1%  |
|   |               | KTP                                                        | 0   | 0%  |
|   |               | Lainnya                                                    | 25  | 7%  |

Pengolahan data SKM langsung dilakukan secara otomatis melalui aplikasi E-SKM dengan alamat website: [skm.bandung.go.id](http://skm.bandung.go.id)

Tabel 3.15

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

| URAIAN           | NILAI UNSUR PELAYANAN |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | U1                    | U2   | U3   | U4   | U5   | U6   | U7   | U8   | U9   |
| IKM Per Unsur    | 3.31                  | 3.35 | 3.41 | 3.96 | 3.29 | 3.47 | 3.56 | 3.24 | 3.73 |
| IKM Unit Layanan | 87.02 (Baik)          |      |      |      |      |      |      |      |      |

**Grafik 3.1****IKM per Unsur pada Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022**

Survey IKM dilakukan sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 dengan metode tabel Morgan & Kriticje terhadap 350 responden yang memperoleh layanan dari Dinas Sosial Kota Bandung. IKM Dinas Sosial Kota Bandung ditargetkan sebesar 85 sesuai dengan yang ditargetkan dalam dokumen RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2019-2023 dan Renstra Perubahan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023. Pada Triwulan IV Tahun 2022 realisasi IKM Dinas Sosial sebesar 87.02

**Instrumen atau cara pengukuran Indikator**

Nilai akumulasi atas unsur-unsur yang dinilai sesuai Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana variable yang digunakan terdiri atas:

1. Persyaratan layanan
2. Prosedur layanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/tarif layanan
5. Produk/spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana pemberi layanan
7. Perilaku pelaksana pemberi layanan



**Kinerja nyata dengan Rencana**

Capaian kinerja IKM pada Triwulan IV Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target rencana kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16**  
**Tabel Kinerja Nyata dengan Rencana**

| No | Indikator Kinerja                | Satuan | 2022   |           | %      |
|----|----------------------------------|--------|--------|-----------|--------|
|    |                                  |        | Target | Realisasi |        |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | %      | 85     | 87.02     | 102.38 |

**Kinerja nyata dengan target akhir tahun berjalan**

Capaian kinerja IKM pada Triwulan IV Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.17**  
**Tabel Kinerja Nyata dengan target akhir tahun berjalan**

| No | Indikator Kinerja                | Satuan | Triwulan Akhir Tahun |           | %      |
|----|----------------------------------|--------|----------------------|-----------|--------|
|    |                                  |        | Target               | Realisasi |        |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | %      | 85                   | 87.02     | 102.38 |

**Output program/kegiatan dan keuangan**

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan beserta alokasi anggaran yang menunjang terhadap pencapaian kinerja IKM pada Dinas Sosial Kota Bandung yakni:



Tabel 3.18  
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 2

| No  | Urusan/Bidang/<br>Program/Kegiatan                                             | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | %     | Outcome / Output                                                                      | Target<br>Outcome<br>/ Output | Realisasi<br>Outcome<br>/ Output |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                                                                              | 3              | 4              | 5     | 6                                                                                     | 7                             | 8                                |
| A   | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | 29.450.789.188 | 28.222.199.140 | 95,83 | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                            | 100%                          | 100%                             |
| I   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | 208.261.450    | 204.897.058    | 98,38 | Jumlah dokumen evaluasi dan perencanaan kinerja perangkat daerah                      | 4 dokumen                     | 4 dokumen                        |
| 1   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | 208.261.450    | 204.897.058    | 98,38 | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                      | 4 dokumen                     | 4 dokumen                        |
| II  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | 15.129.014.242 | 14.626.305.287 | 96,68 | Jumlah laporan pengelolaan keuangan perangkat daerah                                  | 12 dokumen                    | 12 dokumen                       |
| 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 14.863.348.122 | 14.363.855.667 | 96,64 | Jumlah Dokumen Pelaporan penyediaan Gaji danTunjangan                                 | 12 dokumen                    | 12 dokumen                       |
| 2   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 232.354.120    | 229.284.320    | 98,68 | Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD                   | 12 dokumen                    | 12 dokumen                       |
| 3   | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | 13.296.000     | 13.220.800     | 99,43 | Jumlah dokumen tindaklanjut/ tanggapan pemeriksaan                                    | 12 dokumen                    | 12 dokumen                       |
| 4   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | 20.016.000     | 19.944.500     | 99,64 | Jumlah laporan sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD                                     | 12 dokumen                    | 12 dokumen                       |
| III | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 117.390.608    | 103.802.057    | 88,42 | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                            | 12 dokumen                    | 12 dokumen                       |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | 39.325.000     | 39.319.253     | 99,99 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                | 50 Stel                       | 50 Stel                          |
| 2   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | 78.065.608     | 64.482.804     | 82,60 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan | 1 kegiatan                    | 1 kegiatan                       |
| IV  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 1.961.902.673  | 1.838.533.477  | 93,71 | Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran                                   | 12 dokumen                    | 12 dokumen                       |



|     |                                                                                                                  |                      |                      |              |                                                                                                        |                   |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | 1.000.853.701        | 984.525.000          | 98,37        | Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                               | 5 paket           | 5 paket           |
| 2   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | 154.515.440          | 145.532.262          | 94,19        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 12 dokumen        | 12 dokumen        |
| 3   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                        | 196.090.000          | 176.758.775          | 90,14        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 12 dokumen        | 12 dokumen        |
| 4   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                         | 13.200.000           | 13.200.000           | 100,00       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 12 dokumen        | 12 dokumen        |
| 5   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                        | 67.849.910           | 48.652.500           | 71,71        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 12 dokumen        | 12 dokumen        |
| 6   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | 529.393.622          | 469.864.940          | 88,76        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 dokumen        | 12 dokumen        |
| V   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>1.297.533.119</b> | <b>1.225.180.000</b> | <b>94,42</b> | <b>Jumlah Paket Barang yang disediakan</b>                                                             | <b>1 Paket</b>    | <b>1 Paket</b>    |
| 1   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                              | 1.297.533.119        | 1.225.180.000        | 94,42        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit            | 1 Unit            |
| VI  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                      | <b>7.435.429.176</b> | <b>7.025.244.709</b> | <b>94,48</b> | <b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>                                     | 12 dokumen        | 12 dokumen        |
| 1   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | 1.039.533.600        | 809.446.709          | 77,87        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 dokumen        | 12 dokumen        |
| 2   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | 6.395.895.576        | 6.215.798.000        | 97,18        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 90 orang          | 90 orang          |
| VII | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>3.301.257.920</b> | <b>3.198.236.552</b> | <b>96,88</b> | <b>Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah</b>                                                 | <b>12 dokumen</b> | <b>12 dokumen</b> |
| 1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.246.043.300        | 1.195.542.870        | 95,95        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 dokumen        | 12 dokumen        |
| 2   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 99.770.000           | 92.965.950           | 93,18        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 dokumen        | 12 dokumen        |



|   |                                                              |               |               |       |                                                                           |           |           |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.955.444.620 | 1.909.727.732 | 97,66 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 3 dokumen | 3 dokumen |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

Apabila kita membandingkan antara Capaian Kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada sasaran ke-2 maka kita dapat melihat tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja pada Sasaran 2 yaitu sebesar 6,55% sementara tingkat efektifitasnya sebesar 106,83%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.19 sebagai berikut:

Tabel 3.19

Tingkat Efisiensi Anggaran atas Capaian Kinerja Sasaran 2

| No                          | Sasaran                                                   | Indikator                          |                            | Satuan | Kinerja |           |        | Keuangan          |                                     |                |                |       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|                             |                                                           |                                    |                            |        | Target  | Realisasi | (%)    |                   | Program                             | Pagu           | Realisasi      | %     |
| 2                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung | 1                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai  | 85      | 87.02     | 102.38 | 1                 | Program Penunjang Urusan Pemerintah | 29.450.789.188 | 28.222.199.140 | 95,83 |
|                             |                                                           | RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR |                            |        |         |           | 102.38 | TOTAL PER SASARAN | 29.450.789.188                      | 28.222.199.140 | 95,83          |       |
| TINGKAT EFISIENSI 6,55 %    |                                                           |                                    |                            |        |         |           |        |                   |                                     |                |                |       |
| TINGKAT EFEKTIFITAS 106,83% |                                                           |                                    |                            |        |         |           |        |                   |                                     |                |                |       |

Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung tercapainya target IKM pada Tahun 2022 ialah adanya pusat layanan kesejahteraan sosial dengan fasilitas dan SDM yang memadai, sehingga mampu memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal.

Faktor Penghambat

Salah satu faktor yang dapat menghambat ketercapaian target IKM Dinas Sosial ialah masih belum berjalan secara optimalnya Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial yang berada di tingkat Kelurahan, tujuan adanya Puskesmas di tingkat Kelurahan ialah untuk lebih mendekatkan layanan bagi warga miskin dan tidak mampu.

Solusi

Salah satu solusi untuk mengatasi rendahnya kualitas layanan yang diberikan Puskesmas di Tingkat Kelurahan ialah dengan cara melakukan pertemuan rutin dengan para pengelola Puskesmas Kelurahan sehingga informasi dan tingkat pemahaman atas suatu produk layanan dapat merata di seluruh kelurahan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Sosial Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 4 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 131.11 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102.38 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 47.811.797.513 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 45.670.202.162, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas Sosial Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.141.595.351

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan



melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 4, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 131.11 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 102.38 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 47.811.797.513 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Sosial Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung adalah 95.52 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

## **B. REKOMENDASI**

1. Harus melakukan pemutakhiran data DTKS karena merupakan data dasar untuk warga miskin yang membutuhkan bantuan pendidikan, kesehatan dan sosial;
2. Optimalisasi penanganan untuk korban bencana;
3. Harus membuat aturan pelaksana yang lebih rinci terkait program Kartu Bandung Sejahtera;
4. Optimalisasi Puskesmas;
5. Harus ada dukungan anggaran untuk Tim Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS.

## **C. TINDAK LANJUT LKPJ**

1. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial telah melakukan pemutakhiran DTKS secara rutin setiap tahunnya melalui Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Optimalisasi bantuan bagi korban bencana telah direalisasikan melalui Program Penanganan Bencana pada Tahun 2022;



3. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial telah melakukan pemutakhiran DTKS secara rutin setiap tahunnya melalui Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Pertemuan atau rapat dengan para pengelola Puskesmas Kelurahan selalu diadakan secara rutin selama Tahun 2022;
5. Honorarium bagi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS telah dialokasikan melalui Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota pada Tahun 2022.

Bandung, 30 Januari 2023  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA BANDUNG



**H. SONI BAKHTIYAR, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19750625 199403 1 001



DOKUMENTASI KEGIATAN

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Sasaran 1                                                            |
| Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan |

PENYEDIAAN PERMAKANAN BAGI KORBAN BENCANA



PENGEMBANGAN EKONOMI KELUARGA MISKIN



BIMBINGAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR DAN LANJUT USIA





#### BIMBINGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

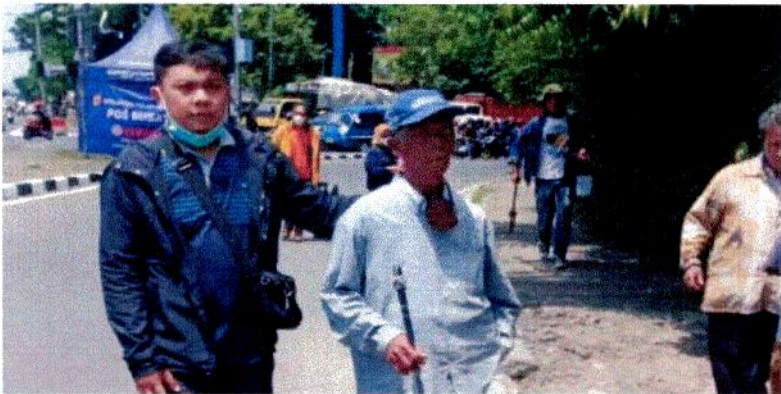


#### BIMBINGAN SOSIAL BAGI TUNA SOSIAL





PENJANGKAUAN





REHABILITASI SOSIAL DASAR DI UPTD RUMAH SINGGAH





|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 2</b>                                          |
| Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung |

**PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL**

